

ABSTRAK

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terbawah dalam hirarki sistem pemerintahan Republik Indonesia yang diorganisir oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan Pasal 25 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi nya bertanggung jawab kepada Kepala Desa, karena Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Akan tetapi pengisian Perangkat Desa hanya dapat dilakukan ketika perangkat desa berhenti karena 1.Meninggal Dunia,2 Permintaan Sendiri, 3.Diberhentikan. Diakomodirnya otonomi desa yang lebih luas desa dapat mengelola rumah tangganya sendiri salah satunya Pengisian Perangkat Desa seperti halnya yang dilakukan oleh 391 desa di Kabupaten Klaten yang melaksanakan pengisian perangkat desa secara serentak pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis normatif*. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan metode studi kepustakaan/dokumentasi.serta menggunakan media wawancara untuk memperkuat/menambah data sekunder.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses Rekrutmen Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Klaten pada Tahun 2018 dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut proses perencanaannya terkait dengan proses rekrutmen pengisian jabatan perangkat desa pihak Kabupaten Klaten menggelar rapat koordinasi dengan pihak Kecamatan dalam rangka pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Klaten dan dilakukan *crosscheck* kepada desa atas jumlah kekosongan jabatan perangkat desa dan pada pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan dimasing-masing desa pada tahap seleksi administrasi. Pada tahapan rekrutmen ini, tahapan tes yang dilakukan yaitu tes tertulis dan tes computer dan syarat khusus bagi calon perangkat desa harus memiliki sertifikat komputer guna untuk menunjang kinerja mereka dengan baik. Tahapan tes diselenggarakan dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah Perguruan Tinggi selaku pihak penguji dan penilai..Meskipun pelaksanaannya lancar tidak dipungkiri dalam prosesnya terdapat hambatan seperti Persepsi serta budaya masyarakat yang belum paham terhadap proses pengisian perangkat desa dengan peraturan baru hingga kurang menunjangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekrutmen pengisian perangkat desa.. Penulis memberikan saran pada proses penyaringan lebih difokuskan lagi pada materi ujian tertulis dan ujian praktek komputer serta menambahkan materi ujian praktek

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, Pengisian Perangkat Desa*

ABSTRACT

Villages are the lowest local communities of the hierarchy system in the Republic of Indonesia which are organized by Villages Government. Based on Article 25 in Act No. 6 of 2014 about Villages, Villages Government is referred to the village head who is assisted by the villages apparatus as the part of administrators of the village. Villages Government has the duties to manage the affairs, the development, and the society of the villages. The villages apparatus are responsible to the village head because they are dismissed and elected by village head. However, the apparatus position can be filled after they are dismissed by following reasons: 1. passed away, 2. by their own request, 3. sent away.). By accomodating the village autonomy widely, a village can manage the authorities such as village aparatus election that had done by 391 villages in Klaten Regency in 2019. The election was done based on Act of Klaten Regency No. 14 of 2017 about the system of village aparatus' election and termination.

The method that is used in this research is normative juridical. Meanwhile, the specification that is used in this research is descriptive analysis. In this research, the writer uses literary/document method as the secondary resource. The writer also uses interview as the medium to support the secondary resource.

The result of research shows that the process of village aparatus election in Klaten Regency in 2019 was appropriate with the Act of Klaten Regency No. 14 of 2017. In its process to recruit the village aparatus, district government is coordinating with sub-district government to confirm the number of village aparatus needed. The recruitment is later held in every village by holding the administrative selection. The next selection stage is divided into written and computer test which there is a specifically condition for candidate where the aparatus must have computer certificate in order to support their performance. These selection stages is held by third party such as from university as the examiner and the assessor so the process of selection becomes clear. Even though the election was held successfully, it cannot be denied that in the process there were some obstacles, such as the people's belief and the society's culture where some of them had not understood the rules of the election. The lack of facilities also became one of the obstacle in this election. The writer, through this research, is giving the suggestion for the village aparatus election, such as increasing the quality of written and computer test, adding the practical test .

Keywords : village government, village aparatus election